

## PERAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DALAM MEMITIGASI AGENCY COSTS

Stephen Prabawa Haryanto, Johan Yanto

Sekolah Bisnis dan Ekonomi – Universitas Prasetiya Mulya  
BSD City Kavling Edutown I.1 , Jl. BSD Raya Utama, BSD City, Tangerang 15339

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to evaluate the impact of ownership concentration, board of commissioner size, proportion of independent commissioner and audit committee size on agency costs in Indonesia. The sample used in this study consists of 263 non financial firms listed in Indonesian Stock Exchange during the period of 2010 – 2014. According to this finding, the best mechanism to mitigate agency costs proxied by asset turnover ratio is audit committee size. As the number of audit committee increased, the asset turnover ratio will also increase thus indicating that management is efficiently using the company's assets. When proxied by selling, general and administrative expense, ownership concentration, which measured by the percentage of shares held by majority become the better mechanism. It denotes that having an ownership concentration in a company could minimize agency costs as majority has power to control management.*

### SARI PATI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *ownership concentration*, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit terhadap *agency costs*. Sampel dalam penelitian ini adalah 263 perusahaan non-financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 – 2014. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran komite audit merupakan mekanisme terbaik dalam memitigasi *agency costs* dengan proksi rasio perputaran aset. Semakin bertambahnya jumlah anggota komite audit maka rasio perputaran aset akan meningkat dan mengindikasikan bahwa manajemen menggunakan aset perusahaan dengan efisien. Kemudian ketika menggunakan proksi biaya *selling, general and administrative, ownership concentration* yang diukur menggunakan persentase kepemilikan saham oleh mayoritas menjadi mekanisme yang paling baik. Hal itu menunjukkan bahwa ketersediaan konsentrasi kepemilikan dapat meminimalisir *agency costs* karena pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan untuk mengendalikan manajemen.

### Keywords:

*agency cost, board of commissioner size, ownership concentration, proportion of independent commissioner, and audit committee size*

### Kata Kunci :

*agency costs, ukuran dewan komisaris, ownership concentration, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit*

### Cores ponding Author:

stephenprbwa@gmail.com

## **Pendahuluan**

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka perusahaan memerlukan tata kelola yang baik untuk mengawasi hal tersebut. Namun di negara berkembang, perusahaan cenderung memiliki tata kelola dan efisiensi informasi yang lemah serta piramida struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Kumar & Tsetsekos, 1999). Kondisi itu memungkinkan timbulnya masalah keagenan di dalam perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) masalah keagenan merupakan perbedaan kepentingan antara *agent* dengan *principal* dimana *agent* berupaya memenuhi kepentingannya sendiri, dalam hal ini *agent* mewakili *principal* untuk menjalankan perusahaan.

Kemungkinan terjadinya masalah keagenan di dalam perusahaan perlu untuk dimitigasi sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat terpenuhi. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) *corporate governance* dapat menjadi mekanisme untuk meminimalisir masalah keagenan karena menahan manajer untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan memberi perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Terkait dengan mekanisme tersebut, organ-organ di dalam perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen dan komite pendukung memainkan peran penting agar pelaksanaan tata kelola menjadi efektif (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Menurut Florackis (2008) ukuran dari anggota dewan mempengaruhi efektivitasnya sebagai mekanisme *corporate governance* sehingga semakin bertambahnya jumlah anggota maka memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan jumlah anggota yang sedikit.

Beberapa penelitian mengenai ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit telah dilakukan. Sanjaya dan Christianti (2012) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen dapat meminimalisir biaya keagenan. Krisnauli dan Hadiprajitno (2014) menemukan hasil sejenis untuk kedua variabel tersebut yaitu dapat meminimalisir biaya keagenan namun ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan. Surjawati, Rosyati dan Widowati (2015) menemukan bahwa proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan.

Hasil penelitian Wijayati (2015) menunjukkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan. Di negara maju, penelitian dilakukan oleh Kusnadi (2003) di Singapura dan menemukan bahwa ukuran dewan tidak dapat mengurangi biaya keagenan sedangkan ukuran komite audit dapat meminimalisir biaya keagenan. Singh dan Davidson (2003) menemukan bahwa ukuran dewan tidak dapat meminimalisir biaya keagenan pada perusahaan di Amerika.

Selain mekanisme tata kelola yang telah disebutkan, terdapat faktor lain yang dapat digunakan untuk meminimalisir masalah keagenan yaitu *ownership concentration*. Menurut Gugler dan Yurtoglu (2003) kepemilikan terkonsentrasi atau dalam hal ini pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan mengendalikan manajemen sehingga mengurangi kemungkinan terdapat perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal*.

Penelitian mengenai *ownership concentration* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Sarwar dan Khan (2015) menemukan bahwa *ownership concentration* dapat meminimalisir biaya keagenan pada perusahaan di Pakistan. Hasil serupa dikemukakan oleh Florackis (2008) yaitu *ownership concentration* dapat mengurangi biaya keagenan pada perusahaan di Inggris. Namun Singh dan Davidson (2003) di Amerika menemukan hasil berbeda yaitu *ownership concentration* tidak memiliki pengaruh signifikan. Penelitian sejenis di Indonesia yang dilakukan oleh Hadiprajitno (2013) menunjukkan hasil yaitu *ownership concentration* tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan.

Karena masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian dan juga masih terbatasnya penelitian mengenai *ownership concentration*, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit terhadap *agency costs* menjadikan motivasi untuk melakukan penelitian ini. Penggunaan sektor penelitian yang lebih besar yaitu sektor non keuangan serta periode observasi 5 tahun diharapkan dapat menjadi kontribusi dari penelitian ini. Penelitian hanya difokuskan pada biaya keagenan dengan proksi rasio perputaran aset dan biaya *selling, general and administrative*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh *ownership concentration*, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit terhadap *agency costs* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama

periode 2010-2014. Struktur jurnal ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu bagian pertama pendahuluan, bagian kedua landasan teori, bagian ketiga metode penelitian, bagian keempat analisa dan pembahasan serta bagian kelima kesimpulan dan saran.

## **Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis**

### *Agency Theory*

Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agency theory* yaitu teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara *principal* sebagai pemilik dengan *agent* sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk menjalankan perusahaan. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya, *agent* dapat mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan *principal* terkait maksimalisasi keuntungan bagi *principal*. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan tiga tipe masalah keagenan yang mungkin terjadi yaitu: (1) Tipe 1, konflik antara *principal* (pemegang saham) dengan *agent* (manajer) karena terdapat perbedaan kepentingan; (2) Tipe 2, konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas karena terdapat perbedaan kekuatan terutama dalam pengambilan keputusan; (3) Tipe 3, konflik antara manajer dan pemegang saham dengan pihak ketiga dari luar perusahaan seperti pemberi pinjaman, auditor dan pemerintah karena terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi terkait pengawasan oleh pihak ketiga tersebut.

Lebih lanjut Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa untuk memastikan *agent* mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan *principal* maka dibutuhkan biaya – biaya sebagai berikut: (1) *Bonding cost*, merupakan biaya yang dikeluarkan *principal* untuk memastikan bahwa *agent* tidak mengambil tindakan yang merugikan *principal* atau sebagai jaminan ganti rugi jika hal tersebut terjadi; (2) *Monitoring cost*, merupakan biaya yang dikeluarkan *principal* untuk melakukan pengawasan atas perilaku *agent* termasuk pengendaliannya; (3) *Residual loss*, merupakan kerugian yang mungkin dialami *principal* karena perbedaan keputusan yang diambil *agent* dengan keputusan yang seharusnya diambil untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*.

*Ownership concentration*

Menurut Florackis (2008) salah satu cara untuk mengurangi masalah keagenan yaitu menerapkan konsentrasi kepemilikan karena pemegang saham harus mengawasi manajer dalam menjalankan perusahaan. Konsentrasi kepemilikan pada pemegang saham dengan jumlah yang sedikit dapat mempermudah pengambilan keputusan dibandingkan jika kepemilikan dibagi ke banyak pihak, terutama pemegang saham dengan kepemilikan 51% atau lebih dapat mengurangi masalah keagenan karena dapat mengendalikan jalannya perusahaan sehingga mampu memenuhi kepentingannya sebagai pemegang saham (Shleifer & Vishny, 1997).

Shleifer dan Vishny (1997) mengemukakan bahwa konsentrasi kepemilikan berupa pemegang saham dengan kepemilikan 51% atau lebih dapat meminimalisir biaya keagenan karena pemegang saham tersebut memiliki hak untuk mengendalikan perusahaan terutama dalam pengambilan keputusan. Beberapa penelitian juga menunjukkan hasil sejenis (Florackis, 2008; Kusnadi, 2003; Sarwar & Khan, 2015) sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H1a** : *Ownership concentration memiliki pengaruh signifikan positif terhadap agency costs dengan proksi rasio perputaran aset.*

**H1b** : *Ownership concentration memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap agency costs dengan proksi biaya selling, general and administrative.*

*Ukuran Dewan Komisaris*

Menurut Kiel dan Nicholson (2003) ukuran dewan memiliki hubungan dengan masalah keagenan karena dengan memiliki anggota yang banyak dapat meningkatkan pengawasan atas kinerja manajemen sehingga meminimalisir potensi terjadinya masalah keagenan. Truong dan Heaney (2013) menyatakan bahwa dengan bertambahnya jumlah anggota dewan maka pengawasan menjadi lebih baik dalam mengurangi masalah keagenan karena masing-masing anggota memiliki kontribusi kemampuan yang berbeda.

Di Indonesia, anggota dewan menggunakan sistem *two-tier* sesuai Undang – Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Presiden Republik Indonesia & Dewan Perwakilan Rakyat [DPR], 2007) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [OJK] Nomor 33/POJK.04/2014 (OJK, 2014) yang dibagi menjadi dua yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan komisaris dalam UU No. 40 Tahun 2007 dinyatakan memiliki tugas untuk mengawasi jalannya kegiatan operasional dan mengawasi kebijakan yang diambil Direksi serta memberi pendapat sesuai dengan tujuan perusahaan (Presiden Republik Indonesia & DPR, 2007). Sesuai aturan OJK No. 33/POJK.04/2014, dewan komisaris beranggotakan minimum dua dengan salah satu anggota ditetapkan sebagai presiden komisaris dan anggota lainnya sebagai komisaris independen (OJK, 2014).

Semakin besar jumlah anggota dewan maka dapat meminimalisir masalah keagenan karena masing – masing anggota dapat memberikan kontribusi kemampuan dan pengalaman yang berbeda satu sama lain (Truong & Heaney, 2013). Florackis (2008) mengemukakan bahwa jumlah anggota dewan mempengaruhi efektivitasnya sebagai mekanisme *corporate governance*. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut :

**H2a.** *Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan positif terhadap agency costs dengan proksi rasio perputaran aset.*

**H2b.** *Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap agency costs dengan proksi biaya selling, general and administrative.*

#### *Proporsi Komisaris Independen*

Mengacu kepada peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, komisaris independen harus terdapat dalam dewan komisaris dimana jika anggota dewan komisaris berjumlah dua maka salah satunya ditetapkan sebagai komisaris independen dan apabila jumlah dewan komisaris melebihi dua maka minimum 30% harus diangkat menjadi komisaris independen (OJK, 2014). Menurut Krisnauli dan Hadiprajitno (2014) komisaris independen berfungsi untuk melakukan pengawasan terkait tata kelola

perusahaan karena menjadi perwakilan dari pemegang saham sebagai pihak independen sehingga mengikuti kepentingan pemegang saham.

Komisaris independen melakukan pengawasan atas kinerja manajemen terkait tata kelola perusahaan serta menjadi wakil dari pemegang saham dan kepentingannya (Krisnauli & Hadiprajitno, 2014). Tingginya jumlah komisaris independen dapat menjadi alat pengawasan yang memainkan perananan penting dalam mengendalikan masalah keagenan (Gul, Sajid, Razzaq & Afzal, 2012; Setia-Atmaja, Haman & Tanewski, 2011). Mengacu kepada hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis :

**H3a.** *Proporsi komisaris independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap agency costs dengan proksi rasio perputaran aset.*

**H3b.** *Proporsi komisaris independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap agency costs dengan proksi biaya selling, general and administrative.*

#### *Ukuran Komite Audit*

Berdasarkan peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, komite audit wajib dibentuk oleh perusahaan terbuka untuk membantu dan meningkatkan efektivitas tugas dewan komisaris dimana minimum anggota terdiri dari tiga, satu anggota berasal dari komisaris independen dan anggota lainnya berasal dari luar perusahaan (OJK, 2015). Menurut Surjawati *et al.* (2015) komite audit berfungsi untuk memastikan kredibilitas penyusunan laporan keuangan dan menjaga pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut Surjawati *et al.* (2015) komite audit dapat menjaga mekanisme pengawasan perusahaan terutama pelaksanaan tata kelola dan juga menjaga kredibilitas penyusunan laporan keuangan. Semakin tinggi jumlah komite audit dapat meminimalisir masalah keagenan karena pengawasan menjadi lebih efektif (Ghosh *et al.*, 2010; Yasser, Entebang & Mansor, 2011). Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

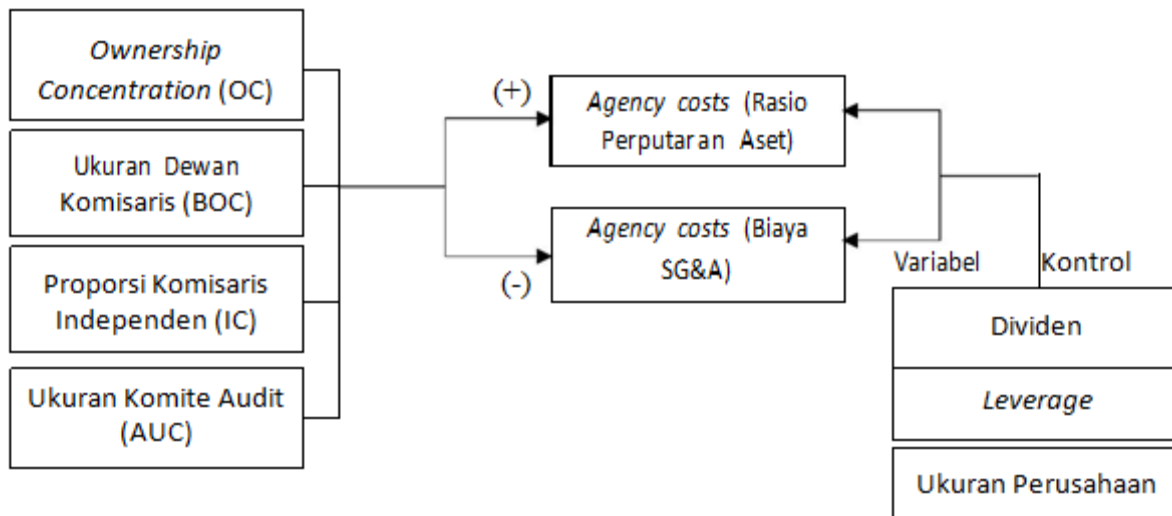
**H4a.** *Ukuran komite audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap agency costs dengan proksi rasio perputaran aset.*

**H4b.** *Ukuran komite audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap agency costs dengan proksi biaya selling, general and administrative.*

### 2.7 Kerangka Penelitian

Mengacu kepada penelitian Florackis (2008), Kusnadi (2003) serta Sarwar dan Khan (2015), *ownership concentration* dapat digunakan untuk meminimalisir biaya keagenan. Tidak hanya itu, anggota dewan di perusahaan juga dapat mengurangi biaya keagenan (Truong & Heaney, 2013). Agar semakin efektif dalam meminimalisir biaya keagenan maka diperlukan komisaris independen dan juga komite audit terutama untuk membantu pengawasan (Setia-Atmaja *et al.*, 2011; Ghosh *et al.* 2010). Oleh karena itu dapat dirumuskan kerangka penelitian sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Penelitian**



### Metode Penelitian

#### *Data dan Sampel*

Penelitian ini menggunakan sampel berupa seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 – 2014. Penelitian ini menggunakan *unbalanced panel data*



dengan sumber data dari *Bloomberg* dan *The Indonesia Capital Market Institute*. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria – kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan publik yang bergerak di sektor non keuangan.
3. Perusahaan publik non keuangan yang memiliki kepemilikan mayoritas lebih dari 50% .
4. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang utama pencatatan laporan keuangan.

Dengan menggunakan criteria-kriteria di atas untuk mengeliminasi sampel, didapatkan jumlah sampel akhir sebanyak 263 perusahaan dengan total observasi 852 selama 5 tahun periode penelitian. Perusahaan pada sektor keuangan tidak diikutsertakan karena memiliki perlakuan keuangan dan akuntansi yang khusus (Sarwar & Khan, 2015).

### ***Variabel Penelitian***

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *agency costs* dengan variabel independen berupa *ownership concentration*, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit. Selain itu terdapat pula variabel kontrol yaitu *dividen*, *leverage* dan ukuran perusahaan. Tabel berikut menunjukkan variabel yang digunakan dalam penelitian beserta proksinya:

**Tabel 1. Variabel Penelitian**

No.	Variabel	Proksi
1.	Agency cost	Rasio asset turnover (ATO) Selling, general and administrative expense (SGA)
2.	Ownership concentration (OC)	Persentase kepemilikan pemegang saham mayoritas lebih dari 50%
3.	Ukuran dewan komisaris (BOC)	Jumlah anggota dewan komisaris
4.	Proporsi komisaris independen (IC)	Proporsi komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris
5.	Ukuran komite audit (AUC)	Jumlah anggota komite audit
6.	Leverage (DAR)	Debt-to-asset ratio = total debt/total asset
7.	Dividen (DPR)	Dividend-payout-ratio = dividend/net income
8.	Ukuran perusahaan (Log_TA)	Log Total asset

### ***Model Penelitian***

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda karena terdapat factor-faktor yang

dapat mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2005). Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap *agency costs* maka model yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Model 1:

$$ATO_{it} = \alpha_i + \beta_1 OC_{it} + \beta_2 BOC_{it} + \beta_3 IC_{it} + \beta_4 AUC_{it} + \beta_5 DAR_{it} + \beta_6 DPR_{it} + \beta_7 LOG\_TA_{it} + \epsilon_{it}$$

Model 2:

$$SGA_{it} = \alpha_i + \beta_1 OC_{it} + \beta_2 BOC_{it} + \beta_3 IC_{it} + \beta_4 AUC_{it} + \beta_5 DAR_{it} + \beta_6 DPR_{it} + \beta_7 LOG\_TA_{it} + \epsilon_{it}$$

## Analisa Dan Pembahasan

### Analisis Statistik Deskriptif

Berikut merupakan tabel statistic deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian:

**Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min.	Max.
ATO	852	1.02	0.82	0	5.65
SGA_	852	624.6531	1099.779	0.393	5000
OC_	852	0.68	0.13	0.5	0.99
BOC_	852	4.25	1.79	2	12
IC_	852	0.4	0.1	0.2	0.8
AUC_	852	3.08	0.56	0	7
DAR	852	0.22	0.21	0	1.1
DPR	852	0.24	0.45	-2.7	3.2
LOG_TA	852	14.41	1.76	9.11	19.28

Berdasarkan Tabel 2 di atas, variabel dependen *agency costs* menggunakan nama ATO karena menggunakan *Asset Turnover* sebagai proksi. Nilai mean ATO dari perusahaan nonkeuangan yang ada di

Indonesia yaitu sebesar 1.02. Jika melihat dari nilai minimum 0 hingga nilai maksimum 5.65 maka perusahaan dengan ATO sebesar nilai rata-rata masih kurang dalam menghasilkan *revenue* dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Nilai mean SGA\_ dari perusahaan nonkeuangan yang ada di Indonesia yaitu sebesar 624.653.1, dimana variabel ini tercatat dalam miliaran Rupiah, yang berarti rata-rata perusahaan memiliki biaya SG&A sebesar 624.653.1 miliar Rupiah.

Variabel *ownership concentration* menggunakan nama OC\_ dengan nilai mean sebesar 0.68 yang berarti rata-rata perusahaan nonkeuangan di Indonesia memiliki kepemilikan mayoritas sebesar 0.68 atau 68%. Variabel dewan komisaris menggunakan nama BOC\_ dengan mean sebesar 4.25 yang berarti rata-rata perusahaan nonkeuangan di Indonesia memiliki jumlah anggota dewan komisaris sebanyak empat orang. Variabel komisaris independen menggunakan nama IC\_ dan memiliki mean sebesar 0.4 yang dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan nonkeuangan di Indonesia memiliki proporsi komisaris independen sebesar 40 persen. Variabel komite audit menggunakan nama AUC\_ dengan mean 3.08 yang dapat diartikan yaitu rata-rata perusahaan nonkeuangan di Indonesia memiliki tiga anggota yang tergabung di dalam komite audit.

Variabel leverage menggunakan nama DAR sesuai dengan proksi yang digunakan yaitu *debt-to-assets ratio*. Nilai mean sebesar 0.22 yang berarti rata-rata perusahaan nonkeuangan di Indonesia hanya menggunakan hutang untuk membiayai asetnya sebanyak 22 persen. Variabel dividend menggunakan nama DPR sesuai dengan proksi yang digunakan yaitu *dividend payout ratio*. Nilai mean sebesar 0.24 yang berarti rata-rata perusahaan nonkeuangan di Indonesia membagikan dividen hanya sebesar 24 persen dari laba yang diperoleh. Variabel ukuran perusahaan menggunakan nama LOG\_TA sesuai dengan proksi yang digunakan yaitu *logaritme* dari *total asset*. Nilai mean dari variabel ini sebesar 14.41 dengan standar deviasi sebesar 1.76 yang menunjukkan persebaran data dari mean tidak terlalu luas. Nilai minimum sebesar 9.11 terdapat pada PT Steady Safe Tbk dan nilai maksimum sebesar 19.28 dimiliki oleh PT Astra International Tbk.

### ***Uji Hipotesis***

Berikut merupakan hasil uji hipotesis yang dilakukan terhadap variabel dependen dengan proksi pertama yaitu rasio perputaran aset dengan model FE:

**Tabel 6. Uji Hipotesis Model 1**

Number of obs = 852 Number of groups = 231 Prob > F = 0.0000 within R-square = 0.1347				
ATO	Coef.	Std. Err.	t	P> t
OC_	-0.2567253	0.3060585	-0.84	0.402
BOC_	-0.010388	0.0082951	-1.25	0.212
IC_	-0.2949826	0.1014735	-2.91	0.004***
AUC_	0.0442939	0.0090343	4.9	0.000***
DAR	-0.0977741	0.1128343	-0.87	0.387
DPR	-0.0000694	0.0093824	-0.01	0.994
LOG_TA	-0.3125982	0.0403895	-7.74	0.000***
Constanta	5.74292	0.4640346	12.38	0.000
*signifikansi pada 10%		**signifikansi pada 5%		***signifikansi pada 1%

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan uji koefisien determinasi menunjukkan hasil *within R-square* sebesar 0.1358 yang berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat cukup kuat. Selain itu dengan uji F didapatkan nilai Prob > F sebesar 0.0000 yang dapat diartikan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut merupakan penjelasan untuk masing – masing uji hipotesis :

Variabel *ownership concentration* atau OC\_ memiliki koefisien negatif namun tidak berdampak signifikan terhadap variabel dependen sesuai uji t didapatkan hasil  $P > |t|$  sebesar 0.402. Dengan hasil tersebut maka hipotesis 1a ditolak. Variabel ukuran dewan komisaris atau BOC\_ memiliki koefisien negatif namun tidak berdampak signifikan terhadap variabel dependen sesuai dengan uji t didapatkan hasil  $P > |t|$  sebesar 0.212. Hasil itu menjadikan hipotesis 2a ditolak. Variabel proporsi komisaris independen atau IC\_ memiliki koefisien negatif dan berdampak signifikan terhadap variabel dependen

sesuai dengan uji t didapatkan hasil  $P > |t|$  sebesar 0.004. Hal itu berarti semakin tinggi jumlah komisaris independen justru mengurangi efisiensi penggunaan aset dan tidak dapat meminimalisir biaya keagenan sehingga hipotesis 3a ditolak. Variabel ukuran komite audit atau AUC\_ memiliki koefisien positif dan berdampak signifikan terhadap variabel dependen sesuai dengan uji t didapatkan hasil  $P > |t|$  sebesar 0.0000. Hal itu dapat diartikan bahwa semakin bertambahnya jumlah anggota komite audit maka biaya keagenan dapat ditekan karena penggunaan aset semakin efisien. Oleh karena itu hipotesis 4a diterima.

Variabel *leverage* atau DAR memiliki koefisien negatif namun tidak berdampak signifikan terhadap variabel dependen sesuai dengan uji t yaitu didapatkan hasil  $P > |t|$  sebesar 0.387. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Henry (2010). Variabel dividend atau DPR memiliki koefisien negatif namun tidak berdampak signifikan terhadap variabel dependen sesuai dengan uji t yaitu didapatkan hasil  $P > |t|$  sebesar 0.994. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Sarwar dan Khan (2015). Variabel ukuran perusahaan atau LOG\_TA memiliki koefisien negatif dan berdampak signifikan terhadap variabel dependen sesuai dengan uji t yaitu didapatkan hasil  $P > |t|$  sebesar 0.000. Hasil ini sesuai dengan penelitian Sarwar dan Khan (2015).

*Uji Hipotesis Model 2*

Berikut merupakan hasil uji hipotesis yang dilakukan terhadap variabel dependen dengan proksi kedua yaitu biaya *selling, general and administrative* (SGA) dengan model FE:

**Tabel 7. Uji Hipotesis Model 2**

Number of obs = 852 Number of groups = 231 Prob > F = 0.0000 within R-square = 0.1403				
SGA_	Coef.	Std. Err.	t	P> t
OC_	-665.5661	273.6855	-2.43	0.016**
BOC_	33.8146	10.85047	3.12	0.002***

IC_	101.5737	106.7151	0.95	0.342
AUC_	50.8473	23.29689	2.18	0.03**
DAR	285.0185	57.44892	4.96	0.000***
DPR	-51.86057	23.94102	-2.17	0.031**
LOG_TA	291.0695	29.89851	9.74	0.000***
Constanta	-3505.208	346.8787	-10.10	0.000
*signifikansi pada 10%	**signifikansi pada 5%		***signifikansi pada 1%	

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan uji koefisien determinasi menunjukkan hasil *within R-square* sebesar 0.1403 yang berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat cukup kuat. Selain itu dengan uji F didapatkan nilai  $Prob > F$  sebesar 0.0000 yang dapat diartikan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut merupakan penjelasan untuk masing – masing uji hipotesis :

Variabel *ownership concentration* atau OC\_ memiliki koefisien negatif dan berdampak signifikan terhadap variabel dependen sesuai uji t didapatkan hasil  $P > |t|$  sebesar 0.016. Hasil tersebut berarti mekanisme konsentrasi kepemilikan atau dalam hal ini pemegang saham mayoritas lebih dari 50% dapat digunakan untuk meminimalisir biaya keagenan sehingga hipotesis 1b diterima. Variabel ukuran dewan komisaris atau BOC\_ memiliki koefisien positif dan berdampak signifikan terhadap variabel dependen sesuai dengan uji t didapatkan hasil  $P > |t|$  sebesar 0.002. Hasil itu menunjukkan semakin meningkatnya jumlah anggota dewan komisaris maka biaya keagenan justru semakin besar sehingga hipotesis 2b ditolak. Variabel proporsi komisaris independen atau IC\_ memiliki koefisien positif namun tidak berdampak signifikan terhadap variabel dependen sesuai dengan uji t didapatkan hasil  $P > |t|$  sebesar 0.342. Hal itu menjadikan hipotesis 3b ditolak. Variabel ukuran komite audit atau AUC\_ memiliki koefisien positif dan berdampak signifikan terhadap variabel dependen sesuai dengan uji t didapatkan hasil  $P > |t|$  sebesar 0.03. Hal itu dapat diartikan bahwa semakin bertambahnya jumlah anggota komite audit justru menyebabkan biaya keagenan mengalami peningkatan.

Variabel *leverage* atau DAR memiliki koefisien positif dan berdampak signifikan terhadap variabel dependen sesuai dengan uji t yaitu didapatkan hasil  $P > |t|$  sebesar 0.000. Hasil itu sesuai dengan

penelitian Singh dan Davidson (2003). Variabel dividend atau DPR memiliki koefisien negatif dan berdampak signifikan terhadap variabel dependen sesuai dengan uji t yaitu didapatkan hasil  $P > |t|$  sebesar 0.031. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Kusnadi (2003). Variabel ukuran perusahaan atau LOG\_TA memiliki koefisien positif dan berdampak signifikan terhadap variabel dependen sesuai dengan uji t yaitu didapatkan hasil  $P > |t|$  sebesar 0.000. Hasil ini sesuai dengan penelitian Kusnadi (2003) serta Sarwar dan Khan (2015).

### ***Pembahasan***

Terjadinya masalah keagenan di dalam perusahaan dapat merugikan *principal* karena agen menggunakan sumber daya perusahaan untuk memenuhi kepentingannya tanpa memenuhi kepentingan *principal*. Hal itu menyebabkan *principal* harus mengeluarkan biaya untuk meminimalisir masalah keagenan yang disebut dengan *agency cost*. Guna mengurangi biaya keagenan tersebut, maka perusahaan dapat menerapkan *corporate governance*.

Setelah dilakukan uji hipotesis didapatkan hasil sebagai berikut; pertama, *ownership concentration* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *agency cost* dengan proksi rasio perputaran asset sesuai dengan penelitian Singh dan Davidson (2003), namun memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *agency cost* dengan proksi SGA. Hal tersebut berarti ketersediaan konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan atau dalam penelitian ini diukur menggunakan kepemilikan mayoritas dapat meminimalisir *agency cost* karena menurunkan biaya SGA. Ini sesuai dengan penelitian Florackis (2008), Kusnadi (2003).

Kedua, ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *agency costs* dengan proksi rasio perputaran aset sesuai dengan penelitian Wijayati (2015) yang berarti bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang banyak atau sedikit tetap tidak dapat mempengaruhi *agency costs*. Akan tetapi ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap *agency costs* dengan proksi SG&A. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bertambahnya anggota dewan komisaris tidak mampu untuk

meminimalisir biaya keagenan karena biaya SG&A justru meningkat dan hal itu sesuai dengan penelitian Wijayati (2015).

Ketiga, proporsi komisaris independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *agency costs* dengan proksi rasio perputaran aset yang berarti peningkatan jumlah komisaris independen justru menurunkan efisiensi pemanfaatan aset. Hasil itu sesuai dengan penelitian Hadiprajitno (2013) namun ketika diukur terhadap proksi SG&A, proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan seperti penelitian Surjawati *et al.* (2015) yang berarti berapapun jumlah komisaris independen tidak dapat mempengaruhi biaya keagenan.

Terakhir, ukuran komite audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *agency costs* dengan proksi rasio perputaran aset yang menunjukkan bertambahnya jumlah komite audit menyebabkan penggunaan aset perusahaan semakin efisien sesuai dengan penelitian Kusnadi (2003). Akan tetapi ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *agency costs* dengan proksi SG&A sesuai dengan penelitian Henry (2010), Krisnauli dan Hadiprajitno (2014) serta Surjawati *et al.* (2015) yaitu bertambahnya jumlah anggota komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap biaya keagenan.

### **Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan**

Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa *agency costs* dengan dua proksi yaitu rasio perputaran aset dan biaya *selling, general and administrative*. Variabel independen yang digunakan terdiri dari *ownership concentration*, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit. Selain itu terdapat pula variabel kontrol berupa *leverage, dividend* dan ukuran perusahaan. Setelah dilakukan uji hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua mekanisme *corporate governance* dapat digunakan untuk meminimalisir biaya keagenan di dalam perusahaan. Dengan menggunakan proksi rasio perputaran aset, mekanisme terbaik yaitu ukuran komite audit karena seiring bertambahnya jumlah anggota komite audit maka penggunaan aset perusahaan semakin efisien. Kemudian berdasarkan proksi SG&A mekanisme yang paling baik yaitu *ownership concentration*



terutama dengan kepemilikan mayoritas karena pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan untuk mengendalikan perusahaan dan mengawasi kinerja manajemen dengan lebih baik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait pengaruh *ownership concentration*, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit terhadap *agency costs*. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi.

Bagi investor dan calon investor diharapkan dapat memperhatikan kemungkinan terjadi masalah keagenan di dalam perusahaan. Jika terjadi masalah tersebut maka memerlukan biaya keagenan untuk meminimalisirnya. Salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan di dalam perusahaan yaitu dengan meningkatkan kepemilikan mencapai 50% atau lebih. Namun karena berpotensi menimbulkan masalah keagenan tipe 2 maka sebagai pemegang saham mayoritas diharapkan tetap dapat mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas ketika mengambil keputusan. Selain itu perlu juga memperhatikan ukuran komite audit karena jumlahnya yang semakin banyak dapat meningkatkan efisiensi penggunaan aset sehingga menurunkan biaya keagenan.

Penelitian ini tentunya tidak luput dari keterbatasan. Pada penelitian ini, peneliti tidak dapat memperoleh penjabaran detail dari biaya *general and administrative* sehingga kurang dapat melihat kemungkinan *agent* mengkamufleskan dana perusahaan sebagai biaya iklan untuk keuntungan pribadi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan penjabaran dari biaya *general and administrative* agar dapat melihat adanya potensi *agent* menggunakan dana perusahaan untuk keuntungan pribadi dengan mengkamufleskannya ke dalam biaya iklan.

## Daftar Pustaka

- Florackis, C. (2008). *Agency costs and Corporate Governance Mechanisms: Evidence for UK Firms*. *International Journal of Managerial Finance*, 4(1), 37-59.
- Ghosh, A., Marra, A. & Moon, D. (2010). Corporate Boards, Audit Committees, and Earnings Management: Pre- and Post-SOX Evidence. *Journal of Business Finance & Accounting*, 37(9) & (10), 1145-1176.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gugler, K. & Yurtoglu, B.B. (2003). Corporate Governance and Dividend Pay-out Policy in Germany. *European Economic Review*, 47, 731-758.
- Gul, S., Sajid, M., Razzaq, N. & Afzal, F. (2012). Agency costs, Corporate Governance and Ownership Structure (The Case of Pakistan). *International Journal of Business and Social Science*, 3(9).
- Hadiprajitno, P.B. (2013). Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, dan Biaya Keagenan di Indonesia (Studi Empirik pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 9(2), 97-127.
- Henry, D. (2010). Agency costs, Ownership Structure and Corporate Governance Compliance: A Private Contracting Perspective. *Pacific-Basin Finance Journal*, 18, 24-46.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kiel, G.C. & Nicholson, G.J. (2003). Board Composition and Corporate Performance: How the Australian Experience Informs Contrasting Theories of Corporate Governance. *Corporate Governance: An International Review*, 11(3), 189-205.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). *Indonesia's Code of Good Corporate Governance*. Indonesia: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Krisnauli & Hadiprajitno, P.B. (2014). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-13.
- Kumar, P.C. & Tsetsekos, G.P. (1999). The Differentiation of Emerging Equity Markets. *Applied Financial Economics*, 9, 443-453.
- Kusnadi, Y. (2003). Corporate Cash Holdings and Corporate Governance Mechanisms. From [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=479401](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=479401) (Diakses pada 27 Agustus, 2016).
- Lind, D.A., Marchal, W.G. & Wathen, S.A. (2013). *Statistical Techniques in Business & Economics*. Boston: McGraw-Hill/Irwin.
- Otoritas Jasa Keuangan (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014*. Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015*. Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia & Dewan Perwakilan Rakyat (2007). *Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Priyatno, D. (2014). *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis (1<sup>st</sup> ed.)*. Yogyakarta: C.V. ANDI OFFSET.
- Sanjaya, I.P.S. & Christianti, I. (2012). Corporate Governance and Agency Cost: Case in Indonesia. 2<sup>nd</sup> *International Conference on Business, Economics, Management and Behavioral Sciences*.
- Sarwar, S. & Khan, M.K. (2015). Ownership of Blockholders and Agency costs: Evidence from Pakistan. *Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 2(4), 379-382.
- Setia-Atmaja, L., Haman, J. & Tanewski, G. (2011). The Role of Board Independence in Mitigating Agency Problem II in Australian Family Firms. *The British Accounting Review*, 43, 230-246
- Shleifer & Vishny (1997). A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, 52(2), 737-738.
- Singh, M. & Davidson III, W.N. (2003). Agency costs, Ownership Structure and Corporate Governance Mechanisms. *Journal of Banking & Finance*, 27, 793-816.
- Surjawati, Rosyati & Widowati, A.I. (2015). Corporate Governance, Struktur Kepemilikan dan Biaya Agensi (Pada Perusahaan LQ 45 Indonesia Tahun 2009-2011). *Seminar Nasional Hasil Penelitian V*.
- Truong, T.T. & Heaney, R. (2013). The Determinants of Equity Agency Conflicts Between Managers and Shareholders: Evidence from Australia. *Journal of Multinational Financial Management*, 23, 314-326.
- Wijayati, F.L. (2015). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Biaya Keagenan. *EBBANK*, 6(2), 1-16.
- Yasser, Q.R., Entebang, H. & Mansor, S.A. (2011). Corporate Governance and Firm Performance in Pakistan: The Case of Karachi Stock Exchange (KSE)-30. *Journal of Economics and International Finance*, 3(8), 482-491